

**ARTIKEL PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2009
(Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional)**

ANALISIS KEBUTUHAN AKREDITASI UNTUK SBI

**Studi Kasus Di SMA RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)
Se Propinsi Jawa Barat**

Peneliti:

**PROF. H. UDIN S SA'UD, Ph.D
NANI HARTINI, M.Pd**

Dibiayai oleh DIPA UPI sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Strategi Nasional Batch 1, dengan
SK Rektor UPI No : 1145/HM/PL/2009 Tanggal 27 Februari 2009

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOVEMBER, 2009**

ANALISIS KEBUTUHAN AKREDITASI UNTUK SBI

Studi Kasus Di SMA RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Se Provinsi Jawa Barat

Oleh:
Udin S. Sa'ud dan Nani Hartini

Kata Kunci: *Analisis Kebutuhan, Akreditasi Sekolah, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimanakah profil SMA RSBI di Jawa Barat?, (2) Bagaimanakah pengembangan kebijakan SMA RSBI di Jawa Barat?, dan (3) Bagaimanakah analisis kebutuhan akreditasi untuk SMA SBI di Jawa Barat?. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan dan menerapkan model akreditasi sekolah bertaraf internasional. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu (1) membuat pemetaan tingkat Propinsi Jawa Barat Sekolah Menengah Atas (SMA) mana yang telah diunjuk Pemerintah untuk menjadi Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional, dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, ancaman, serta persiapan-persiapan yang dilakukan, (2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan sekolah bertaraf internasional, dan (3) menganalisis kebutuhan akreditasi untuk Sekolah Bertaraf Internasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research & Development, yaitu suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan, serta dapat juga dipergunakan untuk menemukan pengetahuan baru melalui Basic Research. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, LPMP, Kepala Sekolah SMA RSBI di Jawa Barat dan pakar pendidikan. Sementara sumber data sekunder mencakup berbagai pihak yang terkait dengan upaya pengembangan sekolah bertaraf Internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, kuisisioner, instrumen tes, dan analisis dokumen. Dari jumlah populasi SMA RSBI Di Jawa Barat sebanyak 16 sekolah yang tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hanya 5 sekolah yang dijadikan sampel penelitian yaitu : (1) SMA

Negeri 3 Bandung, (2) SMA Negeri 1 Subang, (3) SMA Negeri 2 Tasikmalaya, (4) SMA Negeri 1 Kuningan, dan (5) SMA Negeri 1 Cianjur.

Temuan hasil penelitian diperoleh bahwa (1) pada umumnya sekolah RSBI sudah berakreditasi A yang dikeluarkan oleh Basda, walaupun masih belum mendapatkan akreditasi tambahan yang dikeluarkan oleh negara anggota OECD atau negara maju lainnya, (2) pada umumnya pengembangan kebijakan akreditasi menuju sekolah bertaraf internasional telah dirintis sesuai prinsip-prinsip dan prosedur peningkatan mutu yang berlaku, dan (3) beberapa aspek perlu mendapat perhatian dalam analisis kebutuhan akreditasi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, direkomendasikan antara lain; (1) Pendampingan sekolah RSBI harus tetap dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi lagi, sehingga proses menuju SBI cepat terealisasi, (2) Pemberian dana block grant untuk sekolah RSBI tetap dilakukan dan ditingkatkan besarnya, (3) Sosialisasi dan pemahaman tentang SBI bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah RSBI harus dilaksanakan secara lebih intensif, dan (4) Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menemukan model akreditasi sekolah SMA RSBI.

A. Latar Belakang Masalah

Akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pemerintah melakukan akreditasi sekolah sebagai kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan akreditasi diatur dalam Peraturan Menteri no. 29 tahun 2005 tentang badan akreditasi nasional sekolah/madrasah. Badan ini menangani dan mengangkat tim Assesor untuk mengevaluasi sekolah yang telah diakreditasi.

Pelaksanaan akreditasi bukan paksaan, tetapi tantangan para pimpinan sekolah dan guru. Pelaksanaan kegiatan ini diatur atas dasar Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional No 20 tahun 2003 pasal 60 sebagai berikut :

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan no formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik
- (3) Akreditasi dilakukan secara terbuka

Berdasarkan peraturan yang ada tersebut maka sekolah yang sudah siap untuk diakreditasi mengajukan permasalahan kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Propinsi. Kemudian Badan Akreditasi Propinsi menampung hasil evaluasi dari sekolah yang akan diakreditasi. Apabila pengajuannya dianggap sudah layak, tim assesor akan langsung ke sekolah untuk melakukan konfirmasi evaluasi ke sekolah itu.

Pemerintah melakukan akreditasi sekolah sebagai kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indoesia. Di era globalisasi, ini pemerintah mengharapkan setiap sekolah berupaya selalu meningkatkan standarisasi. Dalam rangka peningkatan standarisasi mutu pendidikan, saat ini mulai dikembangkan sekolah bertaraf internasional, sebagai salah satu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 Ayat (3), yakni "*Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah*

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional". Pengembangan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing bangsa Indonesia di forum internasional

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan "Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional". Pada prinsipnya, Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional harus bisa memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan.

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan memperoleh akreditasi yang sangat baik. Akreditasi menentukan kelayakan program pendidikan dan/atau satuan pendidikan itu sendiri. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu perolehan sertifikat akreditasi minimal "predikat A" dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan memperoleh "predikat A" pada setiap periode akreditasi berarti bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional setiap saat selalu menunjukkan keunggulan kinerja yang sangat baik dan sekaligus merupakan pengakuan terhadap kemampuan Sekolah/Madrasah untuk menjamin mutu pendidikan secara optimal. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan

pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu hasil akreditasi yang baik dari salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan. Oleh karenanya penting untuk dilakukan studi tentang pengembangan model akreditasi sekolah untuk sekolah bertaraf internasional.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah profil SMA RSBI di Jawa Barat?
2. Bagaimanakah pengembangan kebijakan SMA RSBI di Jawa Barat?
3. Bagaimanakah analisis kebutuhan akreditasi untuk SMA SBI di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan dan menerapkan model akreditasi sekolah bertaraf internasional. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu:

1. Membuat pemetaan tingkat Propinsi Jawa Barat Sekolah Menengah Atas (SMA) mana yang telah diunjuk Pemerintah untuk menjadi Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional, dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, ancaman, serta persiapan-persiapan yang dilakukan.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan sekolah bertaraf internasional
3. Menganalisis kebutuhan akreditasi untuk Sekolah Bertaraf Internasional.

D. Kajian Teoritik

1. Akreditasi Sekolah

Jika kita lihat dari beberapa fungsi manajemen bahwasanya evaluasi merupakan seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka akreditasi sekolah dilakukan oleh pemerintah dan kompeten untuk menentukan kelayakan suatu sekolah dalam rangka penjaminan mutu kepada publik dan merupakan salah satu bentuk evaluasi secara komprehensif, hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 60 ayat 1 dan 2 bahwa :

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah No . 19 tahun 2005 pasal 86 dan 87 disebutkan bahwa :

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - 1) BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - 2) BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
 - 3) BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Akreditasi Sekolah

Mutu sekolah merupakan konsep multidimensi yang tidak hanya terkait dengan satu aspek tertentu dari sekolah. Seringkali para "policy maker" melihat bahwa peningkatan mutu pendidikan banyak diupayakan melalui penyediaan sarana yang lengkap, pembaharuan kurikulum atau

peningkatan biaya pendidikan, tanpa menyadari bahwa salah satu komponen dalam proses administrasi pendidikan yang menghasilkan informasi paling berharga dalam meningkatkan mutu pendidikan sering terabaikan, yang sering terlupakan dalam pemanfaatannya yang lebih luas ini tiada lain adalah penilaian. Sekolah sebagai sebuah lembaga yang memiliki tujuan sudah sepatutnya dikelola dengan baik dan benar. Hal ini dimungkinkan karena didalam organisasi sekolah terdapat sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan. Untuk memperoleh gambaran pengelolaan lembaga yang baik dan benar yaitu diperlukannya suatu evaluasi atau penilaian yang nantinya bisa dipergunakan dan menjadi sebuah akuntabilitas publik.

Untuk kepentingan akreditasi, mutu sekolah dilihat dari tingkat kelayakan penyelenggaraan sekolah dan sekaligus kinerja yang dihasilkan sekolah dengan mengacu kepada komponen-komponen utama sekolah. Akreditasi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja sekolah merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh dalam memotret kondisi nyata sekolah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan diperolehnya informasi yang komprehensif tersebut, hasil akreditasi sangat berguna sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis sekolah untuk masa empat tahun dan rencana operasional tahunan sekolah. Mengacu kepada rencana strategis dan operasional sekolah tersebut, sekolah menyusun program kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersifat tahunan sebagai langkah implementasi dalam pengembangan dan peningkatan mutu sekolah secara terencana, terarah, dan terukur.

3. Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dapat diselenggarakan dengan menggunakan model-model penyelenggaraan yang dianggap paling sesuai atau cocok dengan kebutuhan, kekhasan, keunikan, dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap Sekolah/Madrasah, baik untuk penyelenggaraan Sekolah/Madrasah yang baru maupun pengembangan Sekolah/Madrasah yang sudah ada sebelumnya. Model-model penyelenggaraan tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Model "Terpadu - Satu Sistem atau Satu Atap - Satu Sistem"

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model terpadu atau satu atap - satu sistem yaitu penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di dalam satu lokasi dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama. Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model ini dapat dipimpin oleh seorang direktur/manajer yang mengkoordinasikan tiga kepala

Sekolah/Madrasah yang memimpin setiap satuan pendidikan dasar dan menengah.

2. Model "Terpisah - Satu Sistem atau Tidak Satu Atap - Satu Sistem"

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model terpisah atau tidak satu atap - satu sistem yaitu penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di dalam lokasi yang berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama. Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model ini dapat dipimpin oleh seorang direktur/manajer yang mengkoordinasikan tiga kepala Sekolah/Madrasah yang memimpin setiap satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada pada lokasi berbeda.

3. Model "Terpisah - Beda Sistem atau Tidak Satu Atap - Beda Sistem"

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model terpisah - beda sistem yaitu penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lokasi yang berbeda (terpisah) dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda. Penyelenggaraan model ini disarankan hanya pada fase rintisan penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang dalam kurun waktu tertentu harus ditingkatkan secara bertahap ke model

penyelenggaraan satu atap dengan satu sistem atau model penyelenggaraan tidak satu atap dengan satu sistem.

4. Model "Entry - Exit"

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model "Entry - Exit" yaitu penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan cara mengelola kelas-kelas reguler dan kelas-kelas bertaraf internasional. Peserta didik pada kelas-kelas bertaraf internasional yang oleh karena berbagai alasan tertentu tidak bisa melanjutkan di kelas bertaraf internasional bisa pindah ke kelas-kelas reguler. Begitu pula sebaliknya, peserta didik pada kelas-kelas reguler bisa pindah ke kelas-kelas bertaraf internasional, jika dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk masuk ke kelas-kelas bertaraf internasional.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research & Development, yaitu suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan, serta dapat juga dipergunakan untuk menemukan pengetahuan baru melalui Basic Research.

Langkah-langkah dalam proses ini menggunakan siklus R&D, disesuaikan dengan langkah-langkah R&D yang dikemukakan oleh Borg & Gall (1989:784-785), dan secara rinci langkah-langkah R&D yang ditempuh dalam penelitian ini merujuk pada langkah yang dirumuskan oleh Sukmadinata (2006:184) adalah sebagai berikut:

Studi Pendahuluan, pada tahap ini dilakukan tiga kegiatan yaitu studi kepustakaan, survai lapangan, dan penyusunan produk awal atau draft model. Studi kepustakaan dilakukan peneliti untuk mempelajari konsep-konsep atau teori-teori yang berkenaan dengan model akreditasi yang akan dikembangkan.

Peneliti kemudian melakukan survai lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data berkenaan dengan perencanaan (desain) dan pelaksanaan akreditasi sekolah, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, kuisisioner, dan pengamatan.

Berdasarkan data-data tersebut, maka peneliti menyusun draft awal model akreditasi sekolah dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan dan direview melalui proses diskusi dengan pakar dan menjalin komunikasi dengan responden awal, pada akhirnya draft model awal tersebut di revisi dan digandakan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Setelah diperoleh draft model awal maka dilakukan konsultasi dengan ahli (expert judgement). Kemudian diperoleh model akhir tentang : Prosedur Akreditasi, Instrumen Akreditasi, dan Sistem Pengolahan Data Akreditasi.

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, LPMP, Kepala Sekolah SMA RSBI di Jawa Barat dan pakar pendidikan. Sementara sumber data sekunder mencakup berbagai pihak yang terkait dengan upaya pengembangan sekolah bertaraf Internasional.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, kuisioner, instrumen tes, dan analisis dokumen. Dari jumlah populasi SMA RSBI Di Jawa Barat sebanyak 16 sekolah yang tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hanya 5 sekolah yang dijadikan sampel penelitian yaitu : (1) SMA Negeri 3 Bandung, (2) SMA Negeri 1 Subang, (3) SMA Negeri 2 Tasikmalaya, (4) SMA Negeri 1 Kuningan, dan (5) SMA Negeri 1 Cianjur.

F. Temuan Penelitian

Temuan hasil penelitian yang diperoleh antara lain:

1. Pada umumnya sekolah RSBI sudah terakreditasi A yang dikeluarkan oleh Basda, walaupun masih belum mendapatkan akreditasi tambahan yang dikeluarkan oleh negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
2. Pada umumnya pengembangan kebijakan akreditasi menuju sekolah bertaraf internasional telah dirintis sesuai prinsip-prinsip dan prosedur peningkatan mutu yang berlaku

3. Beberapa aspek perlu mendapat perhatian dalam analisis kebutuhan akreditasi, terutama dalam aspek proses pembelajaran, penggunaan bahasa Inggris, pengelolaan, implementasi sertifikat ISO, implementasi sister school, dan penilaian.

G. Kesimpulan

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Pendampingan sekolah RSBI harus tetap dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi lagi, sehingga proses menuju SBI cepat terealisasi.
2. Pemberian dana block grant untuk sekolah RSBI tetap dilakukan dan ditingkatkan besarnya.
3. Sosialisasi dan pemahaman tentang SBI bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah RSBI harus dilaksanakan secara lebih intensif.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menemukan model akreditasi sekolah SMA RSBI.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suwarno. (2002). Problematika dan Upaya dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah. *Jurnal Mimbar Pendidikan*. No.1 Tahun XXI 2002. 28-37
- BASNAS (National Accreditation School Board), (2004). Kebijakan Akreditasi Sekolah (School Accreditation Policy). Jakarta: Depdiknas
- Barkley, Bruce, T. (1994), *Customer Driven Project Management : A New Paradigm In Total Quality implementation*, New York : Mc Graw Hill Inc
- Beeby, C.E. (1993), *Assesment In Indonesian Educational: A Guide In Planning* , Wellington : CER
- Borg, W.R.&Gall, M.D. (1989). *Educational Research: An Introduction* (5th Ed). New York & London: Longman, Inc.
- CASI (2006) accessed in <http://www.sacscasi.org>
- CDE (2006) accessed in http://www.cde.state.co.us/index_accredit.htm
- Cronbach. J. Lee. (1977). "Course Improvement Through Evaluation". Dalam Bellack and Kliebard. (1977). Curriculum And Evaluation. USA: AERA.
- FREP Quality Assurance Working Group (2005). FREP Quality Assurance Framework (*Forest and Range Practice Act* Resource Evaluation Program).
- Herman, J.L, & Herman, J.J, (1995). *Total Quality Management (TQM) For Education, Journal of Education Technology*. May-June (halaman 14-18).
- Hedwig, Rinda. Gerardus Polla (2006). *Model Sistem Penjaminan Mutu*, Graha Ilmu, Jakarta
- Jiyono. 1980. *Cara Mengukur Mutu Pendidikan Dalam Analisis Pendidikan* Depdikbud Jakarta. Don Adam et al. 1991.
- Juran, J.M, (1989), *Merancang Mutu*, Terjemahan Bambang Hartono dari Juran On *Quality By Design*, Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo (Buku ke 1).
- Lewis and Smith. (1996.) *Total Quality in Higher Education*. Delray Beach. Florida. St. Lucie Press.
- Meredith D. Gall, Joyce P. Gall dan Walter R. Borg. (2003). *Educational Research :An Introduction (Seventh Edition)*. United States of America. Pearson Education, Inc.

Schwarz, Stefanie. (2005), *Accreditation and Evaluate In European Higher Education Area*. Springer. Science

Suharsimi Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.

Sukmadinata, Nana. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Rosdakarya.

Willborn, Walter . (1994) *Global Management of Quality Assurance System* , Mc. Graw Hill.

Widjaya. (1993), *Manajemen Mutu Terpadu* , Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional NO 20 tahun 200

Peraturan Pemerintah No 29 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional